

MILITER DAN JIWA KORSA

Oleh: Muradi

Penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung Jakarta oleh oknum anggota Yon Zikon 13, TNI menambah deretan panjang agresifitas militer dalam merespon berbagai masalah terkait dengan eksistensinya, baik secara personal maupun kelembagaan. Penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan misalnya dipicu oleh masalah sepele yang kembali mencoreng wajah TNI secara kelembagaan. Kasus Penyerbuan dan pembakaran Polres OKU, Sumatera Selatan, dan penyerangan dan pengeksekusian empat pengroyok anggota Kopassus di LP Cebongan, Sleman adalah bagian yang tidak terpisahkan dari menguatnya agresifitas militer dalam melihat realitas sosial dan politik yang dilihat dan dihadapinya.

Meski secara definitif dan formal TNI tidak lagi terlibat dalam politik praktis dan masalah keamanan dalam negeri sebagaimana ditegaskan baik dalam Tap MPR No. VI/2000 dan Tap MPR No. VII/2000 yang ditegaskan dengan adanya UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan diperkuat kembali dengan UU No. 34/2004 tentang TNI, namun ketidaksabaran akan dinamika sosial kemasyarakatan dan politik membuat anggota TNI, baik selaku individu maupun instansi melakukan apa yang disebut oleh Claude E. Welch (1976) sebagai respon atas kelambanan elit politik sipil dalam menegakan supremasinya. Tak mengherankan apabila kemudian tuntutan untuk melibatkan kembali TNI pada berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini adalah bentuk pengakuan atas ketidakmampuan elit sipil dalam melakukan konsolidasi demokrasi sebagaimana yang direncanakan paska Orde Baru tumbang.

Jiwa Korsia yang selama ini menjadi pengikat sekaligus penjaga moral dari prajurit dan perwira TNI disebut mulai terganggu oleh berbagai situasi yang memojokkan TNI sebagai institusi maupun personal. Pada kasus penyerangan dan pembakaran Polres OKU dan Kasus Cebongan disebut sebagai gangguan atas semangat jiwa Korsia yang menjadi pengikat hal tersebut. Tewasnya anggota TNI di OKU dan Yogyakarta dan proses penegakan hukum yang lamban dinilai sebagai bentuk pelecehan atas Korsia TNI oleh instansi lain dan kelompok masyarakat. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi pembenar ketika ada oknum anggota Yon Zikon 13 TNI berkelahi dengan sekelompok pemuda yang berakhir dengan penyerangan ke Kantor DPP PDI Perjuangan.

Terganggunya Jiwa Korsia TNI ini dapat dilihat dua perspektif, yakni: Pertama, terganggunya Jiwa Korsia sebagai bagian dari pemicu agresifitas militer dalam merespon apa yang membuat anggota TNI sebagai korban atau teraniaya sebagaimana yang terjadi pada Kasus Cebongan atau Kasus penyerangan Polres OKU, Sumatera Selatan.

Kedua, agresifitas militer yang terjadi selama ini menggunakan sentimen Jiwa korsia sebagai pembangunan solidaritas internal TNI untuk

merespon segala ancaman nir-militer yang selama ini menjadi pemicu menguatnya agresifitas militer dalam merespon hal tersebut di atas.

Pada dua perspektif tersebut di atas, ada permasalahan yang harus segera direspon oleh pimpinan TNI berkaitan dengan agresifitas anggotanya dalam merespon dinamika sosial dan politik yang ada. Kasus penyerangan dan pembakaran Polres OKU, Sumatera Selatan, Kasus Cebongan, dan terakhir Kasus Penyerangan Kantor DPP oleh Yon Zikon 13 adalah refleksi dari apa yang disebut sebagai pemahaman Jiwa Korsia yang tidak tepat. Hal ini untuk meluruskan pandangan bahwa Jiwa Korsia yang selama ini menjadi pembenar dalam berbagai kasus di atas adalah bagian dari pencorengan nama baik TNI oleh segelintir oknum dan hanyalah bentuk dari agresifitas militer semata.

Terkait dengan hal tersebut ada empat hal yang harus dilakukan pimpinan TNI untuk dapat mengontrol agresifitas anggotanya dan menjaga Jiwa Korsia tetap menjadi pengikat, penjaga moral dan kebanggaan anggota TNI. Pertama, salah satu penegasan dalam menjaga Jiwa Korsia adalah dengan memosisikan oknum prajurit dan perwira yang terlibat dalam sejumlah kasus di atas untuk diadili dengan memperhatikan keadilan yang berlaku di masyarakat dan internal TNI. Menjadi tidak penting diadili di pengadilan militer atau pengadilan umum, karena penghukuman yang adil menjadi indikator apakah TNI dapat secara terbuka untuk menyerahkan pengadilan oknum prajuritnya atau justru sebaliknya.

Kedua, pimpinan TNI dapat mengefektifkan mekanisme penghukuman internal, yakni Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dapat mengontrol agresifitas prajurit dan perwiranya dalam merespon berbagai ancaman nir-militer dari publik. Ankum selama ini dianggap menjadi garda terdepan dalam mengendalikan agresifitas anggotanya untuk tetap berada dalam jalur yang semestinya. Karenanya, pimpinan yang mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mengatasnamakan Jiwa Korsia semestinya harus dievaluasi oleh Mabes TNI agar kasus-kasus serupa tidak terjadi kembali.

Ketiga, selain itu, kepemimpinan TNI di semua level juga harus mampu melakukan pembinaan berkesinambungan untuk tetap menjaga Jiwa Korsia yang efektif menjaga kesatuan yang sinergis dengan dinamika sosial dan politik yang ada. Tanpa ada pembinaan yang terus menerus, maka apa yang disebut sebagai respon negatif atas hal-hal yang dianggap mengancam personal maupun instansi akan kerap terjadi.

Dan terakhir, perkuatan pada pola hubungan antar instansi, khususnya institusi keamanan guna melakukan sinergis dalam peran dan fungsinya. Keinginan yang terkesan menggebu-gebu dari TNI untuk terlibat dalam pemberantasan premanisme dan juga pengamanan konflik sosial harus dianggap sebagai langkah yang kurang tepat. Sebab, sebagaimana dalam perspektif keamanan, cepat atau lambat, TNI akan terlibat secara aktif mana kala instansi lain menginginkannya. Selain itu, keinginan yang terkesan menggebu-gebu dalam derajat tertentu akan dibaca oleh oknum prajurit dan perwira sebagai pembenaran dalam mengekspresikan agresifitasnya.

Sebagaimana esensi dari Jiwa Korsia, maka akan lebih baik dan elegan apabila TNI sebagai institusi yang relatif lebih reformis dibandingkan

institusi keamanan lainnya dapat mengontrol agresifitas prajuritnya agar tidak kembali berjibaku dalam kubangan hubungan sipil-militer yang tak berkesudahan. Agresifitas militer dan Jiwa Korsa menjadi dua mata uang yang saling berlawanan, apabila TNI tidak mampu mengendalikannya maka situasi yang dihadapi oleh TNI di masa yang datang akan makin kompleks dan mengancam konsolidasi sipil.